

Kebebasan Sejati: Membaca Ulang 1 Korintus 7 melalui Lensa Paradoks Stoa

Penulis:

Alan Kusuma Banjarnahor¹

Afiliasi:

¹Sekolah Tinggi Teologi HKBP,
Pematangsiantar

Penulis Korespondensi:

Alanmarbun890@gmail.com

Riwayat Naskah:

Diterima: 3 September 2025

Disetujui: 11 November 2025

Diterbitkan: 23 Maret 2026

Abstract

This article explores Paul's statement in 1 Corinthians 7:22a regarding enslaved persons as "free," which appears to reflect and simultaneously modify a Stoic paradox. This exploration highlights the relationship between Pauline thought and Hellenistic philosophy, particularly within the context of the first-century Corinthian community. The study employs a qualitative literature-based method using comparative textual analysis of the biblical text, Pauline terminology, and relevant Stoic philosophical sources, while also considering the social and pastoral context of the Corinthian church. The findings indicate that Paul does not simply reject Stoic thought but adapts and reconfigures it to emphasize divine calling as the foundation of Christian identity and genuine freedom. This modification serves to challenge the Corinthian tendency to privilege social status or specific ascetic practices as the highest moral good. Accordingly, the study demonstrates that Paul's understanding of freedom and moral growth is grounded in faithfulness to divine calling within the diversity of the Christian community.

Keywords: Corinthians; True Freedom; Divine Calling; Paradox; Paul..

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 7:22a mengenai mereka yang diperbudak sebagai "orang merdeka," yang diduga merefleksikan sekaligus memodifikasi paradoks Stoa. Eksplorasi ini menyoroti keterkaitan antara pemikiran Paulus dan filsafat Hellenistik, khususnya dalam konteks jemaat Korintus abad pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis tekstual komparatif terhadap teks Alkitab, terminologi Pauline, serta sumber-sumber filsafat Stoa yang relevan. Analisis juga mempertimbangkan konteks sosial dan pastoral jemaat Korintus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paulus tidak menolak pemikiran Stoa secara langsung, melainkan mengadaptasi dan memodifikasinya untuk menegaskan panggilan ilahi sebagai dasar identitas dan kebebasan sejati orang percaya. Modifikasi ini berfungsi untuk menantang kecenderungan jemaat yang mengutamakan status sosial atau praktik asketis tertentu sebagai kebaikan moral tertinggi. Dengan demikian, tulisan ini menegaskan bahwa konsep kemerdekaan dan pertumbuhan moral dalam teologi Paulus berakar pada kesetiaan terhadap panggilan ilahi di dalam keberagaman komunitas Kristen.

Kata kunci: Korintus; Kebebasan sejati; Panggilan Ilahi; Paradoks Stoa; Paulus..

Pendahuluan

Dalam konteks masyarakat Korintus abad pertama, sistem perbudakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial Kekaisaran Romawi.¹ Status budak dan orang merdeka membentuk relasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat menentukan identitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Perbudakan tidak hanya dipahami sebagai praktik ekonomi, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memengaruhi cara seseorang dipandang dan memperlakukan diri sendiri. Namun, ketika Paulus menyinggung status budak dalam surat 1 Korintus, khususnya pasal 7, ia tidak sedang membahas perbudakan sebagai institusi politis atau mengusulkan perubahan struktural secara sosial. Sebaliknya, Paulus menggunakan realitas tersebut sebagai kerangka teologis untuk menjelaskan panggilan dan identitas jemaat di dalam Kristus, terutama dalam kaitannya dengan konsep kebebasan sejati yang melampaui kondisi eksternal.

Dalam 1 Korintus 7, Paulus membahas berbagai persoalan etis yang dihadapi jemaat Korintus, termasuk pernikahan, perceraian, kehidupan selibat, serta relasi antara orang percaya dan tidak percaya.² Dalam konteks pembahasan ini, ia menyelipkan pernyataan yang mencolok dalam ayat 22, yakni bahwa seorang budak yang dipanggil oleh Tuhan sesungguhnya adalah orang merdeka di hadapan Allah, sementara orang merdeka yang dipanggil adalah hamba Kristus.³ Pernyataan ini bukan sekadar afirmasi spiritual yang bersifat penghiburan, melainkan mengandung ketegangan konseptual yang mendalam. Secara khusus, pernyataan

tersebut tampak menggemakan sebuah formula paradoks yang dikenal luas dalam filsafat Stoa, di mana kebebasan sejati tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh disposisi batin dan hidup yang selaras dengan rasio dan kebajikan.

Meskipun sejumlah penafsir telah mencatat kemungkinan adanya pengaruh pemikiran Stoa dalam surat-surat Paulus, perhatian terhadap paradoks ini dalam konteks 1 Korintus 7 masih relatif terbatas. Banyak kajian cenderung memusatkan perhatian pada isu pernikahan dan seksualitas, sementara dimensi filosofis dan retorik dari pernyataan Paulus mengenai kebebasan dan perbudakan sering kali diperlakukan sebagai komentar tambahan yang tidak menentukan. Padahal, memperhatikan rujukan paradoks ini berpotensi membuka pemahaman yang lebih koheren mengenai struktur argumentasi Paulus secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis yang lebih mendalam terhadap aspek ini menjadi penting untuk menafsirkan maksud dan strategi teologis Paulus dalam pasal yang kompleks ini.

Kompleksitas 1 Korintus 7 juga tercermin dalam sejarah penafsirannya yang panjang dan beragam. Dalam tradisi Reformasi, pasal ini sering dibaca sebagai pengajaran yang menegaskan nilai pernikahan Kristen dan legitimasi hubungan seksual dalam ikatan pernikahan. Sebaliknya, dalam konteks Kekristenan awal, teks ini justru menjadi salah satu dasar teologis bagi berkembangnya praktik hidup selibat dan asketisme. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa pasal tersebut memuat ketegangan internal yang memungkinkan berbagai pembacaan yang berbeda. Ketegangan ini semakin nyata ketika Paulus, di satu sisi, menganjurkan pernikahan

¹ Malcolm Schofield, *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 381.

² Jeremy Punt, "1 Corinthians 7:17-24. Identity and Human Dignity Amidst Power and Liminality," *Verbum*

et Ecclesia 33, no. 1 (2012): 12,

<https://doi.org/10.4102/ve.v33i1.683>.

³ Troels Enberg-Pedersen, *Paul on Identity* (Minneapolis: Fortress Press, 2021), 89–94.

sebagai solusi atas dorongan seksual, tetapi di sisi lain menyatakan preferensinya terhadap kehidupan membujang dan berharap agar orang lain dapat hidup seperti dirinya.⁴

Selain ketegangan antara pernikahan dan selibat, pasal ini juga ditandai oleh perhatian Paulus terhadap beragam kelompok dan kondisi hidup. Paulus secara berulang menyapa orang yang menikah, belum menikah, janda, perawan, budak, dan orang merdeka. Instruksi-instruksinya sering kali disusun dalam pola paralel yang mencakup relasi gender dan status sosial. Namun, pola tersebut kerap terganggu oleh perpindahan topik yang tampak tiba-tiba dan pengulangan instruksi dalam konteks yang berbeda. Paulus dapat berbicara tentang pasangan menikah, lalu beralih ke orang yang belum menikah, kemudian kembali lagi ke topik yang sama dari sudut pandang yang berbeda.⁵ Dinamika ini menciptakan kesan bahwa argumentasinya tidak mengikuti struktur tematis yang rapi, melainkan bergerak secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pastoral jemaat.

Ciri khas lain dari 1 Korintus 7 adalah pendekatan Paulus yang sangat berhati-hati dan tidak dogmatis. Paulus secara eksplisit membedakan antara perintah Tuhan dan pendapat pribadinya, serta menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat tentatif seperti “menurut pendapat saya” atau “saya berharap.”⁶ Meskipun pasal ini sarat dengan perintah dan larangan, sebagian besar instruksi tersebut disertai dengan pengecualian, peringatan, atau bahkan ketegangan internal. Paulus melarang perceraian, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya perpisahan. Ia menegaskan kewajiban seksual dalam

pernikahan, namun sekaligus membuka ruang bagi pantang seksual. Pola ini menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang menetapkan norma tunggal yang kaku, melainkan mengarahkan jemaat untuk mempertimbangkan situasi hidup mereka dalam terang panggilan ilahi.

Ketegangan yang serupa juga terlihat dalam pernyataan Paulus mengenai sunat dan status sosial. Ia menyatakan bahwa sunat tidak bermakna, namun sekaligus menegaskan pentingnya menaati perintah Allah. Ia mendorong budak untuk tidak memedulikan status mereka, tetapi juga menyarankan agar mereka memanfaatkan kesempatan untuk merdeka jika memungkinkan. Perintah berulang untuk “tetap dalam keadaan seperti waktu dipanggil” menjadi kabur ketika Paulus juga membuka kemungkinan perubahan status. Bahkan bagi mereka yang tetap berada dalam kondisi semula, Paulus menghendaki agar mereka menjalaninya seolah-olah kondisi tersebut tidak menentukan identitas mereka.

Penelitian ini berargumen bahwa kerumitan dan ketegangan dalam 1 Korintus 7 dapat dipahami secara lebih koheren melalui kerangka pemikiran Stoa, khususnya melalui analisis terhadap modifikasi paradoks filosofis yang digunakan Paulus. Dengan menggunakan paradoks tersebut, Paulus tidak bermaksud mengadopsi filsafat Stoa secara utuh, melainkan memanfaatkannya secara kritis untuk menantang posisi jemaat Korintus yang mengagungkan praktik pantang seksual sebagai kebajikan moral tertinggi. Paulus menegaskan bahwa pertumbuhan moral dan kebebasan sejati tidak terletak pada status atau praktik tertentu, melainkan pada kesetiaan terhadap panggilan

⁴ Sandi and Yunus D.A. Laukapitang, “Kajian Biblika Tentang Konsep Soal Pernikahan Berdasarkan Surat 1 Korintus 7:1-40 Dan Implikasinya Bagi Orang Kristen Masa Kini,” *Jurnal Jaffray: Repository Skripsi Online* 1, no. 4 (2019): 220, <https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/54>.

⁵ Eiffel Sangian and Peggy Sandra Tewu, “Perkawinan Yang Berkenan: Kajian Hermeneutik Kritik Historis Berdasarkan 1 Korintus 7:1-16 Dan Implikasinya Bagi Jemaat,” *Educatio Christi* 5, no. 1 (2024): 40, <https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v5i1.118>.

⁶ Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1987), 178–82.

ilahi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penggunaan paradoks Stoa merupakan kunci penting untuk memahami strategi teologis dan pastoral Paulus dalam 1 Korintus 7.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data utama penelitian berupa teks Alkitab, khususnya 1 Korintus 7, yang dianalisis secara eksegetis dengan memperhatikan konteks historis, sosial, dan pastoral jemaat Korintus abad pertama. Analisis teks dilakukan dengan menelusuri struktur argumentasi Paulus, penggunaan istilah-istilah kunci, serta ketegangan retorik yang muncul dalam nasihat-nasihat etisnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami maksud teologis Paulus tidak hanya pada tingkat normatif, tetapi juga dalam relasinya dengan situasi konkret dan problematika yang dihadapi jemaat Korintus.

Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis komparatif terhadap teks-teks filsafat Stoa yang relevan, khususnya terkait paradoks kebebasan dan proposisi etis mengenai status sosial, kebajikan, dan pengendalian diri. Sumber-sumber primer dan sekunder dari pemikir Stoa seperti Epiktetus, Seneca, dan Philo dari Aleksandria digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan konseptual sekaligus perbedaan teologis antara etika Stoa dan pemikiran Paulus. Melalui perbandingan ini, penelitian menilai secara kritis bagaimana Paulus mengadaptasi dan memodifikasi paradoks Stoa dalam kerangka teologi panggilan ilahi di dalam Kristus. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk menyingkap strategi teologis dan pastoral Paulus dalam menolak absolutisasi praktik hidup tertentu serta menegaskan kebebasan sejati yang berakar pada panggilan ilahi.

Paradoks Kebebasan dalam Etika Stoa, “Hanya Orang Bijak yang Benar-benar Bebas”

Dalam etika Stoa, kebebasan dipahami melalui apa yang kerap disebut sebagai paradoks kebebasan, yakni gagasan bahwa “hanya orang bijak yang benar-benar bebas.” Paradoks ini menegaskan bahwa kebebasan sejati tidak ditentukan oleh status sosial, kondisi hukum, atau kepemilikan eksternal, melainkan oleh disposisi batin yang dikuasai oleh rasio dan kebajikan. Dalam kerangka ini, seseorang dapat tetap disebut bebas meskipun secara hukum berstatus budak, sementara orang yang secara sosial merdeka justru dipandang sebagai budak apabila hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu dan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Pemahaman inilah yang membentuk dasar etika Stoa dalam menilai kebebasan dan perbudakan.

Pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 7:22 bahwa seorang budak yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang yang telah dimerdekakan-Nya (ἀπελευθερος) menunjukkan kemiripan konseptual yang kuat dengan paradoks tersebut.⁷ Secara sosial dan hukum, status budak tidak berubah, namun secara teologis ia dinyatakan sebagai orang merdeka di hadapan Allah. Ungkapan ini bukan sekadar afirmasi spiritual, melainkan mengandung ketegangan retorik yang disengaja. Seperti halnya paradoks Stoa, Paulus memisahkan kebebasan sejati dari kondisi eksternal dan mengarahkannya pada realitas yang lebih mendasar. Dalam konteks ini, kebebasan dipahami sebagai realitas yang melampaui struktur sosial.

Pemikiran serupa ditemukan dalam tulisan Philo dari Aleksandria, seorang pemikir Yahudi Helenistik yang banyak dipengaruhi oleh etika Stoa. Philo menolak kategori sosial buatan seperti “keturunan asli”, “budak beli”, atau “tawanan

⁷ Benjamin G. White, *Pain and Paradox in 2 Corinthians*

(Tubingen: Mohr Siebeck, 2021), 78–84.

perang” sebagai penentu nilai dan kebebasan manusia. Baginya, orang yang sungguh-sungguh bebas adalah mereka yang memiliki kebebasan batin, yakni hidup yang dikuasai oleh kebajikan dan akal budi. Kebebasan sejati tidak terletak pada relasi kepemilikan atau status hukum, melainkan pada kemampuan jiwa untuk hidup selaras dengan kebenaran. Dengan demikian, Philo mengafirmasi pemahaman Stoa bahwa kebebasan adalah kualitas moral, bukan kondisi sosial.

Seneca, tokoh utama Stoa Romawi, mengembangkan gagasan ini dengan menegaskan bahwa perbudakan fisik tidak serta-merta meniadakan kebebasan sejati.⁸ Menurut Seneca, seseorang dapat berada di bawah kuasa tuannya, tetapi tetap merdeka jika jiwanya tidak dikuasai oleh ketakutan, keserakahan, atau ambisi. Sebaliknya, orang yang secara sosial merdeka dapat menjadi budak sejati apabila hidupnya diperbudak oleh keinginan dan kenikmatan. Seneca secara retorik menggunakan bahasa perbudakan untuk mengkritik struktur nilai masyarakat yang mengagungkan kekuasaan dan kekayaan. Dalam pandangannya, penguasaan diri merupakan tanda utama kebebasan sejati.

Gagasan ini juga ditegaskan oleh Dio Chrysostomus, yang menyatakan bahwa pengalaman perbudakan tidak menghalanginya untuk memiliki kebebasan yang sama dengan orang lain. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebebasan, dalam perspektif Stoa, bersifat universal dan tidak eksklusif bagi kelas sosial tertentu. Selama seseorang hidup sesuai dengan kebajikan dan rasio, ia tetap berada dalam kebebasan sejati. Dengan demikian, perbudakan dan kebebasan tidak dipahami sebagai kondisi yang saling meniadakan secara mutlak, melainkan sebagai realitas moral yang dapat hadir secara paradoksal dalam diri seseorang.

Kebebasan menjadi persoalan orientasi hidup, bukan status eksternal.

Epiktetus, yang sendiri pernah hidup sebagai budak, memberikan refleksi paling tajam mengenai relasi antara perbudakan dan kebebasan. Ia mengutip Diogenes sang Sinis yang menyatakan bahwa kebebasan sejati diperoleh ketika seseorang belajar menguasai dirinya sendiri. Menurut Epiktetus, tidak ada penguasa, bahkan raja yang benar-benar memiliki kuasa atas orang yang telah menguasai pikirannya. Kuasa eksternal hanya menjangkau tubuh, bukan kehendak dan rasio.⁹ Oleh karena itu, seseorang menjadi budak sejati bukan karena status sosialnya, melainkan karena ketidakmampuannya mengendalikan diri.

Para filsuf Stoa merangkum pandangan ini dalam paradoks etika yang terkenal: hanya orang bijak yang benar-benar bebas, sedangkan orang bodoh adalah budak. Cicero, Philo, dan Epiktetus mengungkapkan gagasan ini dengan berbagai formulasi, namun inti pemikirannya tetap sama. Kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan bertindak secara mandiri dan rasional (ἐξουσία αὐτοπραγίας), sedangkan perbudakan adalah ketiadaan kemampuan tersebut. Paradoks ini sengaja dirumuskan secara provokatif untuk mengguncang pemahaman umum tentang status, nilai, dan kebebasan manusia. Tujuannya bukan untuk retorika kosong, melainkan untuk mengarahkan manusia pada hidup yang berlandaskan kebajikan.

Paradoks kebebasan dalam etika Stoa ini memiliki pengaruh luas dan berfungsi sebagai kritik tajam terhadap ketergantungan manusia pada harta, kuasa, dan kenikmatan. Bahasa perbudakan digunakan untuk menyingkapkan bahwa mereka yang tampak bebas secara sosial sering kali justru terbelenggu oleh keinginan dan ketakutan mereka sendiri. Dalam kerangka ini, kebajikan dipahami sebagai satu-satunya jalan menuju εὐδαιμονία, yakni kebahagiaan atau

⁸ Seneca, *Letters From a Stoic* (London: Penguin Classics, 2004), 102.

⁹ Epictetus, *Discourses and Selected Writings* (Penguin Classics, 2008), 200–204.

kesejahteraan sejati. Pandangan ini juga berkaitan erat dengan ajaran Stoa bahwa “hanya yang indah secara moral yang benar-benar baik,” sementara kekayaan, kesehatan, dan status sosial dikategorikan sebagai hal-hal netral (ἀδιάφορα).¹⁰ Melalui paradoks-paradoks ini, etika Stoa mendefinisikan ulang makna kebebasan dan kebaikan secara radikal.

Proposisi Etis dalam Kerangka Etika Stoa dalam ayat 1b

Dalam 1 Korintus 7, khususnya ayat 1b, Paulus merespons persoalan etis yang muncul di jemaat Korintus dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dekat dengan filsafat Stoa, meskipun telah dimodifikasi sesuai dengan teologi Kristen. Pernyataan “adalah baik bagi laki-laki untuk tidak menyentuh perempuan” tampaknya mencerminkan kecenderungan asketis yang berlebihan dalam komunitas tersebut. Paulus menanggapi pandangan ini bukan dengan penolakan frontal, melainkan melalui strategi etis yang menempatkan berbagai kondisi hidup dalam perspektif yang relatif dan paradoksal. Dengan pendekatan ini, Paulus menegaskan bahwa status sosial maupun kondisi eksistensial manusia, termasuk pernikahan, perbudakan, kebebasan, dan praktik keagamaan bukanlah faktor penentu nilai moral tertinggi dalam kehidupan Kristen. Yang terutama, menurut Paulus, adalah panggilan Allah, bukan situasi konkret manusia di dunia.

Pendekatan ini terlihat konsisten dalam berbagai nasihat Paulus. Dalam soal pernikahan (ayat 15), ia menegaskan bahwa status menikah atau tidak menikah tidak memiliki bobot moral absolut. Demikian pula dalam persoalan

perbudakan dan kebebasan (ayat 22), kedua kondisi tersebut diperlakukan secara paradoksal, yakni budak dapat menjadi orang merdeka di dalam Tuhan, dan orang merdeka dapat menjadi hamba Kristus. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari (ayat 29–31), Paulus mendorong umat untuk hidup dengan jarak kritis terhadap realitas duniawi, sebab dunia ini sedang menuju kepada kefanaannya. Hal yang sama berlaku terhadap sunat (ayat 19), sebuah ritual keagamaan yang penting dalam tradisi Yahudi, namun oleh Paulus direlatifkan nilainya dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah.¹¹

Strategi etis ini berkaitan erat dengan kritik Paulus terhadap penilaian moral yang berlebihan atas satu aspek kehidupan tertentu, khususnya pantang seksual. Dalam filsafat Stoa, istilah *kalon* (baik) memiliki muatan moral yang sangat kuat. Namun, pemberian nilai moral absolut pada satu praktik, seperti pengendalian hasrat seksual dipandang bermasalah, karena berpotensi melahirkan bentuk “nafsu” baru yang justru memperbudak manusia.¹² Dengan memanfaatkan dan sekaligus memodifikasi kerangka etika Stoa, Paulus menunjukkan bahwa kebajikan tidak terletak pada ekstremitas asketisme, melainkan pada kebebasan batin yang berakar pada panggilan Allah. Oleh karena itu, penggunaan paradoks dalam 1 Korintus 7 bukanlah kontradiksi yang tidak terarah, melainkan sebuah proposisi etis yang bertujuan meluruskan pandangan ekstrem di jemaat Korintus dan menempatkan praktik hidup Kristen dalam keseimbangan yang sehat dan teologis.

Bantahan terhadap Absolutisasi Nilai Moral Pernikahan dan

¹⁰ Runar Thorsteinsson, *Roman Christianity and Roman Stoicism: A Comparative Study of Ancient Morality* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 98–99.

¹¹ A.A. Long and D.N. Sedley, *The Hellenistic Philosophers Vol. 1* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987),

419.

¹² Manase Gulo, “SEKSUALITAS DALAM PERNIKAHAN MENURUT 1 KORINTUS 7:1-5,” *Manna Rafflesia* 4, no. 2 (2018): 134–35, https://doi.org/10.38091/man_raf.v4i2.93.

Selibat dalam ayat 2-7

Dalam 1 Korintus 7:2-7, Paulus melanjutkan dialog etisnya dengan jemaat Korintus yang cenderung mengabsolutkan pengendalian diri dan pantang seksual sebagai satu-satunya jalan hidup yang bermoral. Jemaat menggunakan istilah *kalon* (baik) untuk menegaskan keunggulan hidup asketis, terutama sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dosa seksual.¹³ Paulus tidak menolak kekhawatiran ini, sebab ia sendiri menyebut secara eksplisit bahaya *porneia* (percabulan) dan *akrasia* (ketidakmampuan mengendalikan diri). Namun, ia menolak kesimpulan bahwa pantang seksual atau hidup selibat merupakan satu-satunya bentuk kehidupan yang bernilai moral. Sebaliknya, Paulus mengajukan argumen tandingan bahwa pernikahan juga dapat dijalani secara etis dan bahkan berfungsi sebagai sarana pengendalian diri yang sah.

Dalam konteks ini, Paulus sebenarnya sedang berpartisipasi dalam perdebatan filosofis yang lebih luas mengenai nilai pernikahan, sebagaimana dicatat oleh Deming.¹⁴ Kendati Paulus secara pribadi lebih memilih hidup selibat, ia tidak meniadakan pernikahan sebagai pilihan hidup yang bermakna. Sikap ini sejalan dengan pandangan filsafat Stoa yang memandang pernikahan sebagai *kathēkonta*, yakni tindakan yang sesuai dengan tatanan alam-duniawi: bukan kebajikan tertinggi, tetapi pantas, layak, dan bermanfaat bila dijalankan dengan bijaksana. Bahasa Paulus dalam ayat 3 mencerminkan kerangka ini, di mana hubungan seksual dalam pernikahan dipahami sebagai komitmen sosial yang memiliki nilai praktis dan etis, meskipun tidak diangkat sebagai kebaikan moral mutlak. Kesamaan pola pikir ini semakin ditegaskan

melalui paralel dengan Roma 13:7-8, di mana kewajiban sosial dipandang baik dan benar jika dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, seks dalam pernikahan ditempatkan Paulus dalam kategori tindakan sosial yang sah dan berguna, bukan sebagai tujuan moral tertinggi.

Namun, pandangan Paulus mengenai pernikahan juga secara signifikan mengguncang norma sosial zamannya. Dalam dunia Yunani-Romawi, termasuk dalam pemikiran Stoa, suami umumnya dipahami memiliki otoritas penuh atas istri. Paulus justru menghadirkan sebuah paradoks etis dalam ayat 4 “suami berkuasa atas tubuh istrinya, tetapi istri juga berkuasa atas tubuh suaminya.” Pernyataan ini menyandingkan dua realitas yang tampak bertentangan, tetapi dinyatakan sama-sama benar. Pola ini selaras dengan konsep paradoks dalam filsafat Stoa, sebagaimana dirumuskan oleh Epiktetos, yakni pengakuan bahwa dua hal yang berlawanan dapat sah secara bersamaan.¹⁵ Paradoks ini menciptakan dilema praktis dalam kehidupan pernikahan: setiap individu dipanggil untuk menggunakan tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah, namun pada saat yang sama tubuh itu berada di bawah otoritas pasangannya. Melalui ketegangan ini, Paulus menegaskan bahwa tidak ada otoritas manusiawi yang berdiri otonom; semua otoritas harus tunduk kepada otoritas Kristus (ayat 23). Pandangan ini konsisten dengan pernyataannya sebelumnya bahwa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh apa pun (6:12) dan bahwa tubuh adalah milik Tuhan (6:13).

Lebih lanjut, Paulus secara tegas menolak anggapan bahwa hidup selibat merupakan satu-satunya bentuk kehidupan yang benar secara moral. Walaupun ia sendiri menjalani hidup

¹³ Kezia Hutagalung, “Menerima Karunia Selibat: Karunia Yang Khas Dari Allah (Eksegese 1 Korintus 7:7),” *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 9, no. 1 (2020): 118, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v9i1.59>.

¹⁴ Will Deming, *Paul on Marriage and Celibacy: The*

Hellenistic Background of 1 Corinthians 7 (Eerdmans Publishing Company, 2004), 216–19.

¹⁵ Epiktetos, *Discourses and Selected Writings* (London: Penguin Classics, 2008), 200–204.

selibat, Paulus menegaskan bahwa pernikahan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mencegah perilaku seksual yang menyimpang. Bahkan, dalam ayat 5, ia memerintahkan pasangan menikah untuk tidak saling menjauh secara seksual.¹⁶ Pengecualian hanya diberikan dalam konteks spiritual tertentu, yakni pantang sementara demi pengabdian pada doa, yang harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dalam batas waktu tertentu. Tujuannya adalah agar mereka tidak jatuh ke dalam godaan karena akrasia. Di sini terlihat keseimbangan pemikiran Paulus, ia mengakui bahwa dorongan seksual dapat menghambat pertumbuhan rohani, tetapi ia juga menyadari bahwa pernikahan membawa tantangan tersendiri, seperti terbatasnya fokus pada pelayanan Tuhan.¹⁷

Dengan demikian, baik pernikahan maupun hidup selibat dipandang Paulus sebagai pilihan yang sah, selama dijalani dengan pengendalian diri dan dalam kesetiaan kepada Kristus. Pernikahan tidak boleh ditinggikan sebagai kebajikan tertinggi, dan selibat pun tidak boleh diidealkan secara absolut. Yang utama adalah otoritas Kristus, sehingga tuntutan panggilan ilahi termasuk pengabdian dalam doa berhak mendapat prioritas bahkan di dalam kehidupan pernikahan. Paulus menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa instruksinya bersifat kelonggaran, bukan perintah mutlak, sambil mengakui bahwa setiap orang menerima karunia yang berbeda dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kehidupan yang lebih unggul secara universal. Semua pola hidup seksual yang dianugerahkan Tuhan berpotensi menjadi kalon, baik secara moral apabila dijalani dengan pengendalian diri dan dalam ketaatan

kepada Kristus.

Keragaman Praktik Seksual dan Pernikahan sebagai Kebajikan dalam ayat 7-15a

Dalam 1 Korintus 7:7-15a, Paulus mengembangkan argumennya dengan menekankan keragaman karunia yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang. Bertolak dari pengakuan bahwa setiap individu menerima karunia yang berbeda-beda, Paulus kemudian mengarahkan nasihatnya kepada beberapa kelompok dalam jemaat dengan memberikan arahan yang bersifat spesifik dan selalu disertai dengan pengecualian tertentu. Pola argumentasi ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun kondisi hidup atau praktik seksual yang dapat diperlakukan sebagai kebaikan moral yang mutlak dan berlaku tanpa syarat. Bahkan dalam kelompok yang sama, Paulus mengakui adanya variasi pertimbangan yang ditentukan oleh situasi konkret masing-masing individu.¹⁸

Paulus juga menekankan bahwa pengelolaan seksualitas tidak harus diwujudkan secara eksklusif melalui pantang seksual. Pernikahan, menurutnya, dapat menjadi komitmen yang baik dan bermanfaat, karena menyediakan kerangka relasional yang membantu mencegah *porneia* (perzinahan) dan *akrasia* (kehilangan kendali diri).¹⁹ Dalam relasi pernikahan yang teratur dan bertanggung jawab, individu dibantu untuk menata hasrat seksualnya secara konstruktif, sekaligus belajar menjalani otoritas dan tanggung jawab secara timbal balik.

Melalui argumentasi ini, Paulus secara tegas

¹⁶ Robin Stefanus Zalukhu and Riste Tioma Silaen, "TANGGAPAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PELANGGARAN MORAL DALAM 1 KORINTUS: IMPLIKASI BAGI KEHIDUPAN GEREJA MODERN," *Sesawi: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 6, no. 2 (2025): 195–96, <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v6i2.340>.

¹⁷ Philips Wilson, *Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical*

on His Inconsistency (Leiden: Brill, 2022), 156–58.

¹⁸ Abraham J. Malherbe, *Paul and the Popular Philosophers* (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 156–58.

¹⁹ O. Larry Yarbrough, *Not Like the Gentiles: Marriage Rules in the Letters of Paul* (Atlanta: Scholars Press, 1985), 222–26.

menolak anggapan jemaat Korintus bahwa pantang seksual merupakan kebaikan moral yang absolut. Pada saat yang sama, ia juga mengkritik pemahaman tentang kebebasan yang tidak berpusat pada Kristus, yakni kebebasan yang justru berisiko terjebak dalam hawa nafsu atau dalam klaim otonomi yang berlebihan. Kendati demikian, Paulus tidak mengabaikan kegelisahan jemaat terkait pengendalian seksual dan kemungkinan bahwa relasi manusiawi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu, ia mengarahkan perhatian mereka pada tujuan yang lebih mendasar, yaitu pertumbuhan sejati di dalam Kristus dan kebebasan yang autentik—kebebasan yang membebaskan manusia baik dari dominasi hawa nafsu maupun dari tekanan struktur sosial dan hukum yang mengikat.

Panggilan Ilahi sebagai Dasar Perkembangan Moral tanpa Keharusan Mengubah Status Hidup dalam ayat 15b-24

Dalam 1 Korintus 7:15b–24, Paulus mengarahkan perhatian jemaat Korintus pada prinsip teologis yang mendasar, yakni bahwa panggilan ilahi di dalam Kristus merupakan faktor penentu perkembangan moral dan keselamatan, bukan perubahan kondisi hidup. Ayat 15b kerap ditafsirkan sebagai kelanjutan langsung dari ayat 15a, khususnya terkait dengan pasangan yang ditinggalkan atau kematian pasangan. Namun, melalui penggunaan istilah yang berkaitan dengan perbudakan dan panggilan Allah, ayat ini juga dapat dibaca sebagai pernyataan transisional yang menutup diskusi tentang relasi pernikahan sekaligus membuka tema yang lebih luas mengenai

panggilan dan kebebasan Kristen. Ketika Paulus merujuk pada “hal-hal ini,” ia menunjuk pada keseluruhan situasi hidup yang telah dibahas sebelumnya, sehingga ayat 15b berfungsi sebagai respons langsung terhadap klaim awal jemaat Korintus (ayat 1b) bahwa hidup selibat menjamin kebebasan dan kebahagiaan sejati (*eudaimonia*).

Paulus menolak asumsi tersebut dengan menegaskan bahwa status “di dalam Tuhan” justru membebaskan orang percaya dari perbudakan oleh keadaan hidup tertentu. Allah memanggil umat-Nya untuk hidup dalam damai sejahtera, yaitu ketenangan batin yang tidak ditentukan oleh perubahan kondisi eksternal, melainkan oleh kesetiaan pada panggilan ilahi. Konsep “damai sejahtera” ini menjadi fondasi bagi ajaran Paulus tentang “tetap bertahan” dalam panggilan, bukan sebagai sikap pasif, melainkan sebagai kesetiaan aktif terhadap kehendak Allah di tengah situasi konkret yang telah ditetapkan-Nya.

Bagi Paulus, pertumbuhan rohani hanya mungkin terjadi melalui panggilan ilahi tersebut. Prinsip ini ditegaskannya dengan kembali menilai secara positif kehidupan pernikahan. Sebagaimana nasihatnya kepada para budak dalam ayat 21, Paulus menekankan bahwa orang yang sudah menikah tidak perlu cemas terhadap keterbatasan hidup mereka atau terhadap anggapan bahwa kondisi tertentu lebih “menyelamatkan” daripada yang lain. Sebaliknya, keadaan hidup yang ada justru dapat menjadi sarana keselamatan bila dijalani dalam ketaatan kepada Allah.²⁰ Pernikahan, alih-alih menghalangi keselamatan, dapat menjadi ruang konkret di mana kasih, kesetiaan, dan pertumbuhan rohani diwujudkan. Oleh sebab itu, Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar tidak menolak pernikahan dengan dalih spiritualitas.²¹

Penegasan ini diperluas dalam ayat 17–24, yang menekankan prinsip umum bagi seluruh

²⁰ Dale B. Martin, *Slavery as Salvation: The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity* (Eugene: Wipf & Stock, 1990), 62–65.

²¹ Stephen J. Chester, *Conversation at Corinth: Perspectives on Conversation in Paul's Theology and the Corinthian Church* (London: T&T Clark, 2003), 59–63.

jemaat. Meskipun frasa *ei mē* pada awal ayat 17 sering menimbulkan kebingungan, pembacaan yang konsisten dengan ayat 15b–16 menunjukkan bahwa Paulus sedang menegaskan kesinambungan hidup dalam panggilan Allah. Orang percaya tidak diperbudak oleh keadaan hidup mereka, tetapi dipanggil untuk berjalan setia dalam kondisi yang telah Allah tetapkan. Status menikah atau tidak menikah, disunat atau tidak disunat, budak atau orang merdeka, bukanlah bentuk perbudakan moral, melainkan konteks di mana panggilan Allah diwujudkan. Paulus membedakan dengan jelas antara keadaan hidup sebagai karunia dan panggilan “di dalam Tuhan” sebagai realitas soteriologis yang menyelamatkan.

Paradoks yang dikemukakan Paulus dalam ayat 22 juga dapat menjadi kunci untuk memahami argumen ini. Orang percaya mungkin hidup dalam kondisi yang membatasi secara sosial, tetapi keselamatan mereka tidak ditentukan oleh kondisi tersebut, melainkan oleh keterikatan mereka kepada Kristus.²² Karena itu, Paulus menolak anggapan bahwa perubahan status hidup, misalnya dari menikah ke hidup selibat, secara otomatis membawa kebebasan atau kebahagiaan sejati. Pandangan semacam itu justru berpotensi memperbudak, karena menyamakan praktik hidup tertentu dengan panggilan Allah. Bagi Paulus, hanya panggilan di dalam Kristus yang memiliki kuasa menyelamatkan dan memberi kehidupan.

Dalam ayat 20, Paulus kembali menegaskan pentingnya “tetap bertahan,” bukan terutama dalam keadaan hidup, melainkan dalam panggilan ilahi. Penggunaan kata *kaleō* dalam tulisan Paulus menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah panggilan Allah, bukan sekadar situasi sosial. Karena itu, orang percaya tidak perlu mengubah kondisi hidupnya demi mencapai keselamatan, sebab panggilan Allah tetap berlaku dalam segala situasi.²³ Sikap Paulus yang fleksibel terhadap perubahan dalam pasal ini justru memperlihatkan bahwa ia tidak mengidentikkan panggilan ilahi dengan keadaan hidup tertentu.

Paradoks “budak yang bebas” kembali diperdalam dalam ayat 21–23. Menyebut suatu kondisi sebagai *adiaphoron* tidak berarti menolak kemungkinan perubahan ke arah yang lebih baik. Paulus bahkan membuka peluang bagi budak untuk memperoleh kebebasan bila memungkinkan, namun tanpa menjadikannya keharusan moral. Yang menarik, Paulus tidak memberikan instruksi timbal balik kepada para tuan, suatu keheningan yang sarat makna teologis. Dengan memodifikasi paradoks Stoa, Paulus menegaskan bahwa kebebasan moral sejati hanya dimiliki oleh mereka yang “di dalam Tuhan.” Orang merdeka disebut “hamba Kristus,” sementara budak disebut “orang yang telah dibebaskan.”²⁴ Paradoks ini menegaskan supremasi otoritas Kristus atas seluruh struktur sosial.

Visi Paulus berpuncak pada keyakinan bahwa ketundukan kepada Kristus membebaskan orang percaya dari dominasi sesama manusia dan dari perbudakan terhadap keinginan diri sendiri. Larangan untuk menjadi “budak manusia” (ayat 23) menegaskan bahwa kepemilikan Kristus atas umat-Nya merombak hierarki sosial yang ada.²⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh para penafsir modern, dinamika ini bukanlah pembalikan status yang total, melainkan pengaturan ulang relasi melalui “asimetri timbal balik,” di mana otoritas

²² Refamati Gulo, “Makna Keselamatan Keluarga Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Menurut 1 Korintus 7:14-16,” *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (2024): 191, <https://doi.org/10.38189/jan.v4i2.665>.

²³ William Barclay, *The Letter To The Corinthians* (Edinburgh: Saint Andrew Press, 2013), 108–11.

²⁴ J. Albert Harrill, “Revisiting the Problem of 1 Corinthians 7:21,” *Biblical Research* 65 (2020): 79.

²⁵ Salti Neni Randan et al., “Teologi Paulus Mengenai Pernikahan Berdasarkan 1 Korintus 7,” *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2022): 8–9, <https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i2.22>.

manusiawi dilemahkan oleh otoritas Kristus.²⁶ Dengan demikian, meskipun Paulus masih bergerak dalam batasan sosial-budaya zamannya, ajarannya secara konsisten menolak absolutisasi praktik hidup tertentu dan mengarahkan jemaat pada kebebasan sejati yang berakar dalam panggilan ilahi di dalam Kristus.

Panggilan Ilahi dan Penerimaan terhadap Keadaan Hidup dalam ayat 25-40

Dalam 1 Korintus 7:25–40, Paulus mengarahkan nasihatnya kepada mereka yang belum menikah (*parthenoi*) dengan tetap mempertahankan pola etika yang fleksibel dan kontekstual. Tujuannya bukan untuk menetapkan aturan baru, melainkan untuk menolong jemaat Korintus mengelola kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga panggilan rohani dapat dijalani tanpa beban yang tidak perlu. Prinsip “tetap dalam keadaan seperti adanya” kembali ditegaskan dalam ayat 26–27 dan dikaitkan dengan adanya “kebutuhan mendesak pada masa kini.”²⁷ Sejalan dengan pembacaan Deming, struktur bahasa Paulus yang berulang menunjukkan bahwa ia sedang kembali merujuk pada pernyataan jemaat dalam ayat 1b, sekaligus meluruskannya. Jika sebelumnya jemaat keliru menganggap praktik tertentu sebagai keharusan moral, Paulus menegaskan bahwa satu-satunya *anankē* (keharusan) yang sejati adalah panggilan ilahi yang menyelamatkan dan mengikat manusia kepada Allah.²⁸

Bertolak dari prinsip tersebut, Paulus menjelaskan bahwa perilaku yang bermakna

secara moral tidak ditentukan oleh perubahan status hidup. Menikah atau tidak menikah bukanlah kategori baik atau jahat, melainkan hal-hal yang bersifat netral. Orang percaya tidak dituntut untuk secara aktif mengubah statusnya demi mencapai kemajuan rohani, meskipun perubahan itu sendiri tidak dipandang sebagai dosa. Untuk menegaskan sikap batin yang tepat, Paulus mengemukakan paradoks eskatologis dalam ayat 29–31 “waktu telah singkat dan dunia ini bersifat sementara.”²⁹ Karena itu, relasi dan kepemilikan duniawi harus dijalani dengan sikap “seolah-olah tidak memiliki.” Pernyataan ini bukan meremehkan pernikahan atau relasi manusia, melainkan menolak keterikatan batin yang berlebihan pada status hidup tertentu. Hidup selibat tidak diwajibkan, tetapi pernikahan juga tidak boleh diangkat sebagai kebutuhan moral yang mutlak.

Pembahasan tentang *parthenoi* dilanjutkan dengan mengulang istilah *anankē* dalam ayat 36–38. Paulus menilai pernikahan sebagai realitas yang membawa beban dan kecemasan tertentu, sebab perhatian seseorang terbagi antara pasangan dan Tuhan. Karena itu, ia mengemukakan dua alasan utama mengapa hidup tanpa menikah dapat dipandang lebih menguntungkan dalam konteks “masa yang singkat”.³⁰ Pertama, pernikahan berpotensi menghadirkan kesulitan jasmani dan loyalitas yang terbagi; kedua, pernikahan, seperti praktik duniawi lainnya, merupakan bagian dari tatanan dunia yang sementara. Atas dasar ini, pilihan untuk tidak menikah dapat membuka ruang kebebasan yang lebih besar bagi pengabdian kepada Tuhan.

Namun, Paulus tetap realistis dan menolak sikap ekstrem. Jika seseorang telah terikat dalam

²⁶ D.B. Martin, *The Corinthian Body* (London: Yale University Press, 1995), 211–12.

²⁷ A.C. Thiselton, *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2000), 605–9.

²⁸ Deming, *Paul on Marriage and Celibacy: The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7*, 223–24.

²⁹ Kimlyn J. Bender, *1 Corinthians* (Grand Rapids: Brazos Press, 2022), 244–47.

³⁰ Elisabeth Natallina, “Selibat Atau Menikah?: Petunjuk-Petunjuk Menentukan Pilihan Berdasarkan Studi Eksposisional 1 Korintus 7,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 18, no. 2 (2019): 170, <https://doi.org/10.36421/veritas.v18i2.341>.

pertunangan dan mengalami dorongan kuat untuk menikah, melanjutkan ke pernikahan bukanlah kesalahan. Yang lebih ideal, menurut Paulus, adalah bila seseorang dapat tetap tidak menikah tanpa tekanan batin. Seluruh nasihat ini, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 35, dimaksudkan untuk kebaikan jemaat (*symforos*): agar mereka hidup bermartabat, terhindar dari gangguan moral, dan dapat memusatkan diri pada Tuhan. Pada akhirnya, baik menikah maupun tidak menikah harus dinilai secara bijaksana dalam terang panggilan Allah, sehingga jemaat Korintus tidak kembali terjebak pada anggapan bahwa suatu status atau praktik tertentu memiliki nilai moral yang mutlak.

Kesimpulan

Paulus menggunakan sebuah paradoks filosofi Stoa yang telah dimodifikasi untuk merespons kekhawatiran jemaat di Korintus dan menegaskan kembali ajarannya. Inti pesannya adalah bahwa tidak ada tindakan tertentu yang memiliki nilai moral mutlak, karena keselamatan hanya datang melalui panggilan mereka dalam Kristus. Paradoks ini membantu Paulus menangani berbagai asumsi yang dibuat oleh jemaat Korintus. Meskipun ia menolak pandangan yang meninggikan praktik tertentu sebagai hal yang secara moral superior, Paulus tetap mendukung kepedulian mereka terhadap perkembangan karakter moral. Baginya, panggilan ilahi adalah satu-satunya faktor yang benar-benar esensial. Sikap Paulus ini menciptakan ambiguitas dalam nasihatnya, sulit untuk menentukan apakah ia lebih menganjurkan hidup selibat atau menikah, atau apakah ia menyarankan orang untuk mempertahankan status quo atau menerima perubahan. Ketidakjelasan ini sebenarnya disengaja, karena Paulus tidak ingin kondisi hidup apa pun dianggap sebagai keharusan etis yang mutlak, yakni sesuatu yang ia pandang sebagai penilaian

keliru dan membelenggu.

Meski demikian, Paulus mengakui bahwa beberapa situasi memang lebih ideal daripada yang lain. Karena itu, ia memberikan panduan praktis yang sederhana untuk membantu jemaat “bertahan” dalam Kristus sambil “melanjutkan” kehidupan dalam keadaan mereka saat ini. Nasihat ini mungkin tidak sempurna untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi individu, namun ia menawarkan suatu ideal untuk kehidupan komunitas. Pada akhirnya, Paulus memodifikasi paradoks ini untuk menekankan aspek khusus dari doktrinnya tentang panggilan Kristus: kematian Kristus memberikan otoritas tertinggi atas kehidupan jemaat Korintus, yang seharusnya mendorong mereka untuk mengevaluasi ulang otoritas-otoritas dan struktur sosial lainnya, sambil tetap mengakui keragaman karunia ilahi dan kebutuhan universal akan panggilan ilahi.

Referensi

- Barclay, William. *The Letter To The Corinthians*. Saint Andrew Press, 2013.
- Bender, Kimlyn J. *1 Corinthians*. Brazos Press, 2022.
- Chester, Stephen J. *Conversation at Corinth: Perspectives on Conversation in Paul's Theology and the Corinthian Church*. T&T Clark, 2003.
- Deming, Will. *Paul on Marriage and Celibacy: The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7*. Eerdmans Publishing Company, 2004.
- Enberg-Pedersen, Troels. *Paul on Identity*. Fortress Press, 2021.
- Epictetus. *Discourses and Selected Writings*. Penguin Classics, 2008.
- Epictetus. *Discourses and Selected Writings*. Penguin Classics, 2008.
- Fee, Gordon D. *The First Epistle to the Corinthians*. Eerdmans Publishing Company, 1987.
- Gulo, Manase. “SEKSUALITAS DALAM PERNIKAHAN MENURUT 1 KORINTUS

- 7:1-5." *Manna Rafflesia* 4, no. 2 (2018): 130–47.
https://doi.org/10.38091/man_raf.v4i2.93.
- Gulo, Refamati. "Makna Keselamatan Keluarga Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Menurut 1 Korintus 7:14-16." *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (2024): 173–97.
<https://doi.org/10.38189/jan.v4i2.665>.
- Harrill, J. Albert. "Revisiting the Problem of 1 Corinthians 7:21." *Biblical Research* 65 (2020).
- Hutagalung, Kezia. "Menerima Karunia Selibat: Karunia Yang Khas Dari Allah (Eksegese 1 Korintus 7:7)." *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 9, no. 1 (2020): 115–32.
<https://doi.org/10.46495/sdjt.v9i1.59>.
- Long, A.A., and D.N. Sedley. *The Hellenistic Philosophers Vol. 1*. Cambridge University Press, 1987.
- Malherbe, Abraham J. *Paul and the Popular Philosophers*. Fortress Press, 1989.
- Martin, Dale B. *Slavery as Salvation: The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity*. Wipf & Stock, 1990.
- Martin, D.B. *The Corinthian Body*. Yale University Press, 1995.
- Natallina, Elisabeth. "Selibat Atau Menikah?: Petunjuk-Petunjuk Menentukan Pilihan Berdasarkan Studi Eksposisional 1 Korintus 7." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 18, no. 2 (2019): 161–74.
<https://doi.org/10.36421/veritas.v18i2.341>.
- Neni Randan, Salti, Nisa Srma Ayurein, and Dewi Andarias Allo. "Teologi Paulus Mengenai Pernikahan Berdasarkan 1 Korintus 7." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2022): 01–10.
<https://doi.org/10.55606/corammundo.v4i2.22>.
- Punt, Jeremy. "1 Corinthians 7:17-24. Identity and Human Dignity Amidst Power and Liminality." *Verbum et Ecclesia* 33, no. 1 (2012): 9 pages.
<https://doi.org/10.4102/ve.v33i1.683>.
- Sandi, and Yunus D.A. Laukapitang. "Kajian Biblika Tentang Konsep Soal Pernikahan Berdasarkan Surat 1 Korintus 7:1-40 Dan Implikasinya Bagi Orang Kristen Masa Kini." *Jurnal Jaffray: Repository Skripsi Online* 1, no. 4 (2019).
<https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/54>.
- Sangian, Eiffel, and Peggy Sandra Tewu. "Perkawinan Yang Berkenan: Kajian Hermeneutik Kritik Historis Berdasarkan 1 Korintus 7:1-16 Dan Implikasinya Bagi Jemaat." *Educatio Christi* 5, no. 1 (2024): 38–53. <https://doi.org/10.70796/educatio-christi.v5i1.118>.
- Schofield, Malcolm. *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought*. Cambridge University Press, 2005.
- Seneca. *Letters From a Stoic*. Penguin Classics, 2004.
- Thiselton, A.C. *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*. Eerdmans Publishing Company, 2000.
- Thorsteinsson, Runar. *Roman Christianity and Roman Stoicism: A Comparative Study of Ancient Morality*. Oxford University Press, 2010.
- White, Benjamin G. *Pain and Paradox in 2 Corinthians*. Mohr Siebeck, 2021.
- Yarbrough, O. Larry. *Not Like the Gentiles: Marriage Rules in the Letters of Paul*. Scholars Press, 1985.
- Zalukhu, Robin Stefanus, and Riste Tioma Silaen. "TANGGAPAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PELANGGARAN MORAL DALAM 1 KORINTUS: IMPLIKASI BAGI KEHIDUPAN GEREJA MODERN." *Sesawi: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 6, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.53687/sjtpk.v6i2.340>.

